

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PILKADA JATENG 2013

Nur Sofyan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
nursofyan1989@gmail.com

Abstrak

Salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) di Jawa Tengah adalah rendahnya tingkat partisipasi politik. Tingkat partisipasi masyarakat Jawa Tengah yang rendah menjadi hambatan bagi penyelenggara pemilu tingkat daerah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh KPUD Kab. Temanggung dalam Pilkada Jateng 2013 dan 2018. Penelitian ini menggunakan teori *Organizational Information Theory* dan strategi Komunikasi Politik dengan pendekatan merawat ketokohan, memantapkan kelembagaan politik, menciptakan kebersamaan, dan membangun konsensus, sehingga penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan kajian strategi komunikasi politik di tingkat kelembagaan penyelenggaraan pemilihan umum. Jenis penelitian ini kualitatif deskriptif dengan minat studi kasus intrinsik. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, studi dokumen serta observasi yang berperan pasif. Kriteria pengambilan data didasarkan pada pemilihan informan dengan kriteria tertentu. Teknik analisis data menggunakan analisis penjadohan pola. Uji validitas data dilakukan dengan cara serentak menggunakan data dengan karakter sama. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kohesivitas dalam strategi komunikasi politik tidak hanya diletakkan dalam aspek membangun kebersamaan dalam mencapai tujuan politik penyelenggaraan Pilkada, namun diletakkan juga pada merawat ketokohan, membangun konsensus dan memantapkan kelembagaan. Dengan demikian hasil dari strategi komunikasi politik akan memiliki nilai optimal untuk mencapai tujuan politik kelembagaan.

Kata kunci: Ambiguitas informasi, Kebersamaan, Kohesivitas ketokohan, Partisipasi politik, Strategi komunikasi politik

Abstract

The biggest challenge in organizing an election of the regional heads (Pilkada), including the election of Governor and Deputy Governor in Central Java, Indonesia, is because of the low levels of public' political participation. That case has become a challenge faced by regional election organizers of the province. In contrast, Temanggung shows significant data on its citizen participation

compared to other districts in Central Java. This research used Organizational Information Theory and political communication strategy by approaching cohesiveness figure, creating togetherness, and build consensus, so that aims to explore the political communication strategy conducted by the Regional Election Commission KPUD of Temanggung Province Pilkada in 2013 and 2018. This research is expected to provide insights to the development of political communication strategies studies. This descriptive qualitative research employed an intrinsic case study as the research design. Post-positivism was employed as the research paradigm. Research respondents and documentation became the source of data. Data were gathered through an in-depth interview, a document analysis, and an observation. This research shows that the cohesiveness of political communication strategies is not only influenced by the aspects of building togetherness in achieving political objectives of the elections but also caring for the characters, build a consensus and establish the institutions.

Keywords: Ambiguity of information, Cohesiveness figure, Political communication strategies, Political participation, Togetherness,

1. Pendahuluan

Peran strategi komunikasi politik kelembagaan dirasakan sangat penting untuk mendorong kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Salah satu tujuan komunikasi politik adalah mensukseskan pemilihan umum. Komunikasi politik bertujuan membentuk dan membina citra dan opini publik. Mendorong tingkat partisipasi politik, memenangi pemilihan, dan mempengaruhi kebijakan politik negara atau kebijakan publik (Arifin, 2011: 177).

Komunikasi politik pada level penyelenggara pemilu dimaknai sebagai upaya menyukseskan pemilu dan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat. Strategi komunikasi politik dilakukan lembaga untuk mencapai tujuan pemilu demokratis. Salah satu langkah strategi komunikasi politik dapat dilihat dari peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi dalam PEMILUKADA. Pada Bab III pasal 3 mengenai tujuan dan target capaian dalam sosialisasi PEMILUKADA (PKPU 11/Kpts/KPU, 2010: 5-6).

KPU memiliki peranan penting dalam mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013. Melaksanakan seluruh langkah strategis, sosialisasi dan informasi PEMILUKADA dengan tujuan mendorong pemahaman dan tingkat partisipasi politik. Pemilu demokratis dapat dilaksanakan apabila memenuhi berbagai kriteria. Prihatmoko menyatakan bahwa Pemilu dapat dikatakan demokratis apabila memenuhi tiga kriteria, yakni (1) keterbukaan; (2) ketepatan; dan (3) efektivitas. Terbuka berarti pemilu harus bersifat terbuka bagi setiap warga negara atau dikenal dengan prinsip hak memilih universal. Ketepatan mengandung arti segala proses yang berkaitan dengan pemilu mulai dari pendaftaran peserta pemilu, verifikasi, kampanye hingga pemungutan suara dan perhitungan suara harus dilakukan secara tepat dan proporsional. Semua yang terlibat dalam pemilu harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Efektivitas berarti jabatan politik harus diisi semata-mata melalui pemilu, tidak dengan cara-cara yang lain seperti penunjukan ataupun pengangkatan (Moesyafa, 2008: 4).

Keterbukaan, ketepatan, dan efektivitas dijadikan acuan dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Jateng yang disampaikan oleh Komisioner KPU Jateng. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pilkada sebesar 53,73% masih dibawah 60%. Tingkat partisipasi yang tergolong rendah dalam proses demokrasi. Sebagaimana disampaikan oleh anggota KPU Jateng "Wahyu Setyawan" bahwa target partisipasi Pilkada Jateng tahun 2013 sangat berat untuk mencapai angka 75 % (<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/28/260028/Partisipasi-Meningkat-73->, diakses tanggal 10-11-2014 pukul 10:07 WIB).

Disaat mayoritas KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tidak berhasil dalam menyelenggarakan PILKADA Jateng 2013 (dengan tingkat partisipasi yang cukup rendah dan memprihatinkan). KPU Kabupaten Temanggung berhasil dalam menyelenggarakan PILKADA Jateng 2013 dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi. Kabupaten Temanggung menempati posisi pertama dengan hasil capaian

partisipasi politik menggembirakan. Anggota Komisioner Divisi Sosialisasi KPU Jateng Andreas Pandiangan mengatakan menyebutkan, daerah dengan partisipasi tertinggi adalah Kabupaten Temanggung dengan tingkat partisipasi 82,89%. Disusul Kabupaten Kudus sebanyak 79,26%. Partisipasi terendah yaitu Kabupaten Pati yang hanya 44,52% total partisipasi pemilihan Gubernur yang diselenggarakan (Pilgub Jateng 2013 <http://regional.kompas.com/read/2013/06/04/15381174/12.Juta.Warga.Jateng.Tak.Nyoblos.di.Pilgub.2013>, diakses tanggal 20-10-2013 Pukul 16.05 WIB).

Penyelenggaraan PILGUB Jateng di Kabupaten/Kota tahun 2013, semua rencana strategis di dasarkan pada peraturan perundangan yang sama. Implementasi dari peraturan perundangan oleh KPU di tingkat Kabupaten/Kota menghasilkan capaian yang berbeda-beda. Kasus inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian "Studi Kasus Strategi Komunikasi Politik KPU Kab. Temanggung dalam PILKADA Jateng 2013". Penelitian ini dilakukan berdasar pada penelitian terdahulu mengenai "*Political Marketing Strategy of Jakarta Governor Election in The 2012^s*" oleh Edhiraras, Rahayu, Natalina, dan Widya dengan pusat perhatian pada kajian *marketing* politik dengan baurannya terkait keberhasilan pasangan Jokowi dan Ahok dalam pertarungan politik Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2013. Penggunaan media sosial seperti *BlacBery*, *Facebook*, *Twitter* dan *Youtube* dalam merepresentasikan keinginan publik dan mendapatkan suara mayoritas dari kalangan menengah ke-atas, etnis cina, kalangan pemilih pemula. Pasangan ini mampu menangkap keinginan pasar politik dengan menggunakan strategi pendekatan pasar. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini mencakup perlunya menyelidiki faktor-faktor penentu implementasi strategi pemasaran politik dalam situasi tertentu. pentingnya kedepan membangun strategi pemasaran politik dengan mengedepankan aspek pembangunan partai politik dan kandidat yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, moral yang kuat dalam memenuhi harapan masyarakat Jakarta dalam mengatasi berbagai persoalan kedepan terkait pesta demokrasi dalam

suatu negara
(<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813015474>, akses tanggal 23-12-2014 pukul 18: 32 WIB).

Penelitian kedua berjudul "*Communication Function of Election*" dilakukan oleh Turska-Kawa dan Wotjasik dari University of Trnava pada tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dasar pemilihan yang dilaksanakan pada tingkat empiris maupun normatif berdasarkan fungsi komunikasi terutama dalam konteks perubahan masyarakat Barat dengan menitik beratkan pada perubahan metode, komunikasi politik serta evolusi dari bentuk partisipasi politik. Penelitian ini menggambarkan transformasi karakter fungsi komunikasi dalam pemilihan yang didasarkan atas perubahan dalam bidang politik dan pemikiran masyarakat. Kecepatan dalam mentransfer setiap perubahan dapat membantu tercapainya perilaku politik dalam konstelasi pesta demokrasi dalam suatu negara (<http://www.communicationtoday.sk/volume-2013/>, diakses tanggal 23-12-2014 pukul 18: 32 WIB). Kedua penelitian terdahulu tersebut menjadi referensi peneliti untuk melakukan penelitian terkait strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Temanggung dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 dan 2018.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Temanggung dalam Pilkada Jateng tahun 2013.

3. Kerangka Teori

Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Organizational Information Theory*. Menurut *Karl Wick* teori informasi organisasi adalah suatu cara untuk menjelaskan bagaimana organisasi mengelola informasi yang bersifat ambigu menjadi masuk akal. Teori ini mempunyai fokus pada proses

pengorganisasian anggota organisasi untuk mengelola informasi. Adapun teori ini memiliki beberapa asumsi mendasar. Pertama Organisasi berada dalam sebuah lingkungan informasi. Kedua Informasi yang diterima sebuah organisasi berada dalam hal ketidak pastian. Ketiga organisasi manusia terlibat di dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ketidak jelasan informasi (West R & Turner L, 2007: 320).

Asumsi pertama didasarkan pada kesadaran bahwa organisasi bergantung pada informasi demi mempertahankan dan mencapai tujuan organisasi. Teori ini memandang bahwa konsep lingkungan informasi memerlukan pengelolaan yang berbeda dimana organisasi berada. Adapun lingkungan informasi ini diciptakan atau dikonstruksi oleh anggota organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan anggota organisasi harus senantiasa memperoleh informasi baik dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi.

Asumsi kedua didasarkan pada perlunya memahami bahwa informasi yang diperoleh organisasi itu berada dalam ketidak jelasan, sehingga hal tersebut mendorong bagi organisasi untuk memilih sumberdaya anggota yang mampu menterjemahkan ambiguitas yang mungkin ditemukan dalam serangkaian informasi yang diperoleh. Informasi yang didapatkan oleh tim survey lapangan oleh KPUD Kab. Temanggung dan Lembaga Pusat Statistik Kab. Temanggung akan diserahkan pada anggota tim publikasi dalam organisasi. Asumsi kedua ini didasarkan pada pentingnya menempatkan sumberdaya organisasi sesuai dengan deskripsi, kewenangan dan kemampuannya dalam ranah organisasi dalam menghadapi tantangan informasi yang terkadang bersifat ambigu. Asumsi ketiga didasarkan pada pentingnya sinergi antara internal organisasi dalam mengurangi ambiguitas informasi baik di dalam internal organisasi maupun yang diperoleh dari eksternal organisasi. Sinergi atas berbagai sumberdaya dalam organisasi diperlukan dalam rangka mengurangi potensi ambiguitas dan informasi yang berpotensi menghambat tujuan organisasi.

Teori kedua yang digunakan adalah strategi komunikasi politik. Menurut Anwar Arifin strategi komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Merawat ketokohan, memantapkan kelembagaan politik, menciptakan kebersamaan dan membangun konsensus merupakan keputusan strategis yang tepat bagi komunikator politik (Arifin, 2011: 235).

Pendekatan teoritis berikutnya berkaitan erat dengan kohesivitas. Kohesi kelompok sebagaimana disampaikan oleh Jalaluddin Rakhmat mengutip pernyataan Collins dan Raven didefinisikan sebagai kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok, dan mencegahnya meninggalkan kelompok. Kohesi diukur dari (1) ketertarikan anggota secara interpersonal pada satu sama lain, (2) ketertarikan anggota pada kegiatan dan fungsi kelompok, dan (3) sejauh mana anggota tertarik pada kelompok sebagai alat untuk memuaskan kebutuhannya (Rakhmat, 2005: 164). Berbicara mengenai kohesivitas dalam suatu kelompok memberikan pemahaman kepada peneliti, ada kekuatan yang mendorong anggota untuk tetap tinggal dalam kelompok. Kekuatan untuk anggota tinggal dalam kelompok sebagai akibat adanya ketertarikan secara interpersonal antar anggota kelompok. Ketertarikan tersebut tidak hanya berhenti pada aspek interpersonal semata, lebih dari itu adalah pada fungsi dan kegiatan yang ada dalam kelompok. Adanya kohesi dalam suatu kelompok akan menyebabkan tingginya umpan balik dari seluruh anggota kelompok. Umpan balik yang tinggi berdampak pada produktivitas, moralitas, efisiensi komunikasi.

Pendekatan berikutnya adalah strategi komunikasi politik. Menurut Anwar Arifin strategi komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Merawat ketokohan, memantapkan kelembagaan politik, menciptakan kebersamaan dan membangun konsensus

merupakan keputusan strategis yang tepat bagi komunikator politik (Arifin,2011: 235).

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *multiple-method*. Gun-Gun Heriyanto menyatakan bahwa pendekatan *multiple-method* adalah penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti mencapai temuan yang lebih valid ketimbang hasil yang dicapai dengan menggunakan satu metode saja (Heriyanto & Rumar, 2013: 146). Contoh pendekatan *multiple-method* misalnya dengan melakukan survey dan wawancara.

Dalam penggunaan *multiple method* ini akan menekankan pada metode kualitatif dengan menggunakan tipe studi kasus yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh lembaga birokrasi penyelenggara pemilu yaitu KPUD Kab. Temanggung dalam Pilkada Jateng 2013. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif sebagaimana tersebut.

Pendekatan studi kasus menurut Rachmat Kriyantono adalah metode riset yang menggunakan berbagai sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis. Proses penelaahan berbagai sumber data ini membutuhkan berbagai macam instrumen pengumpulan data. Sumber data itu dapat menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipan, dokumentasi, hasil survey, rekaman dan bukti fisik lainnya (Kriyantono, 2012: 65).

Studi kasus menurut Norman K. Denzim dan Yvonna S. Lincoln merupakan upaya atau proses mengkaji kasus sekaligus hasil dari proses pengkajian tersebut. Studi kasus memiliki dua aspek penting yang mendasarinya yaitu minat intrinsik dan instrumental pada kasus. Jenis pertama adalah studi kasus intrinsik yang

ditempuh peneliti untuk memahami sebuah kasus tertentu. Jenis penelitian ini bukan ditempuh karena suatu kasus mewakili kasus-kasus lain atau karena menggambarkan sifat atau problem tertentu, namun karena dalam keseluruhan aspek kekhususan dan kesederhanaannya, kasus tersebut menarik minat (Denzim K & Lincoln, 2009: 301). Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian kualitatif dengan desain studi kasus ini digunakan karena peneliti ingin memahami kasus yang menarik minat karena sifat kehasannya. Dalam penelitian ini minat peneliti terkait kasus yang unik adalah dalam penyelenggaraan Pilkada Jateng hampir mayoritas kabupaten /kota hanya menyelenggarakan satu pilkada yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng 2013. Kabupaten Temanggung menyelenggarakan dua Pilkada sekaligus dalam satu tempo yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung tahun 2013. Implikasi penyelenggaraan ini tentu berdampak pada strategi sosialisasi dan informasi yang dilakukan lebih massif dan serentak.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Hasil akhir dari penelitian ini adalah deskripsi detail dari topik yang diteliti (Kriyantono, 2012: 66). Adapun menurut Burhan Bungin penelitian deskriptif menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, ataupun berbagai fenomena realitas sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian. Realitas ditarik ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007: 68).

Tujuan penelitian deskriptif ini adalah (1) mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada. (2) Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku. (3) Membuat perbandingan atau evaluasi. (4) Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang (Bungin, 2007: 69).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti berasumsi bahwa penelitian deskriptif bertujuan mengumpulkan informasi yang bersifat aktual secara rinci dalam melukiskan gejala yang ada. Upaya tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan beserta praktik yang berlaku. yang bertujuan untuk membuat perbandingan maupun evaluasi. Hal ini dilakukan sebagai cara yang bisa ditempuh seseorang dalam menghadapi kemungkinan masalah yang sama dan membuat deskripsi tentang strategi penanganan ke depan dengan membuat perencanaan dan keputusan.

5. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian strategi komunikasi politik mempunyai dimensi yang luas dalam rangka mencapai tujuan politik yang diinginkan. Tentu hal ini menjadi dasar filosofi bagi kandidat, tokoh, lembaga yang berkiprah dalam dunia politik untuk mencapai tujuan politik di masa mendatang. Berbagai tindakan, keputusan digunakan dalam serangkaian strategi politik yang diinginkan. Masing-masing dari mereka memiliki cara dan strategi yang berbeda. Begitu pula dengan strategi komunikasi politik yang menjadi domain dalam penelitian ini yaitu strategi komunikasi politik KPUD Kabupaten Temanggung dalam Pilkada Jateng 2013.

5.1. Merawat Ketokohan

Menurut Anwar Arifin merawat ketokohan terbagi menjadi beberapa hal seperti kredibilitas, interaksi dan kekuasaan. Ketiganya merupakan aspek yang saling berhubungan, sehingga tidak dapat dipisahkan (Arifin, 2011: 238). Merawat ketokohan berawal dari kesadaran tokoh lembaga untuk secara bersama menggunakan kemampuannya dalam hal penguasaan komunikasi, pengetahuan, sikap yang dibangun demi mendapatkan kredibilitas dan kepercayaan publik. Interaksi lembaga yang teramati oleh publik. Delegasi kewenangan kekuasaan yang berdasarkan pada kepercayaan yang dibangun institusi. Merawat ketokohan dilihat sebagai upaya untuk mengurangi distorsi atau ambiguitas

pesan yang masuk kedalam organisasi demi terciptanya kebijakan organisasi yang bernilai dan tepat sasaran.

a. Kredibilitas Ketokohan

Menurut Arifin bahwa kredibilitas timbul dari diri seseorang jika memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan. Berlo menjelaskan bahwa kredibilitas seseorang akan muncul jika memiliki: *Communication Skills* yaitu keterampilan berkomunikasi, *knowledge* yaitu pengetahuan yang luas tentang substansi yang disampaikan, *attitude* yaitu sikap jujur dan bersahabat, dan *social and cultural system* yaitu mampu beradaptasi dengan sistem sosial budaya (Arifin, 2011: 237).

Pemahaman ini menemukan bahwa ketokohan kelembagaan akan terwujud apabila kredibilitas di dalam ketokohan sudah terbangun. Kredibilitas ini terbangun dengan melihat keahlian dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing anggota baik tingkat desa sampai daerah. Hal ini dapat diamati melalui keterbukaan informasi terhadap tahapan seleksi untuk menjadi komisioner KPU dengan memperlihatkan latar belakang dan pengalaman mereka sehingga publik dapat mengakses langsung informasi ini secara terbuka.

b. Interaksi Ketokohan Kelembagaan

Ketokohan lembaga terjalin melalui interaksi/ hubungan baik yang dilakukan antara komunikator politik dalam hal KPU dengan khalayak. Dalam hal ini KPU membangun interaksi dengan masyarakat melalui pemetaan nilai-nilai yang terdekat dengan masyarakat dan memperhatikan faktor-faktor seperti pendidikan, kebudayaan, fasilitas, dan kemudahan akses terhadap masyarakat. Sebagai contoh dalam pelaksanaan Pilkada 2013 di Jateng, KPU melakukan sosialisasi dengan melibatkan kesenian yaitu tarian-tarian untuk menarik atensi publik terhadap keikutsertaan dalam Pilkada, pendekatan terhadap Ormas dan kelompok agama melalui forum-forum diskusi yang dilakukan, dan

pemberian fasilitas khusus terhadap kelompok disabilitas dalam rangka memudahkan aksesibilitas untuk mengikuti Pilkada.

c. Kekuasaan dalam Kelembagaan

Kemampuan dalam mendelegasikan kekuasaan oleh komisioner atau anggota KPU menjadi faktor penting dalam upaya merawat ketokohan lembaga politik. Pendelegasian ini dalam banyak praktik diperlihatkan melalui karakteristik pembagian dan delegasi kekuasaan yang merata dengan mengedepankan umpan balik. Dalam hal ini ditemukan bahwa KPUD Kabupaten Temanggung melakukan kerjasama di dalam internal lembaga melalui siklus informasi yang bergerak merata, delegasi kekuasaan yang kolektif dan massif yang dilakukan secara serentak dalam rangka meminimalisir ketidaksepehaman informasi maupun kebijakan dalam mensukseskan Pilkada wilayah Jawa Tengah 2013.

5.2. Memantapkan Kelembagaan

Ketokohan lembaga memiliki peranan penting dalam strategi komunikasi politik. Ketokohan dalam kinerja kelembagaan KPU akan kuat manakala lembaga ini juga memiliki kekuatan. Implementasi memantapkan kelembagaan dapat dilihat melalui beberapa aspek. Pertama adalah eksistensi lembaga yang tercermin dari kemampuan lembaga untuk menyelenggarakan pemilu secara demokratis. Kedua adalah kepribadian lembaga yang mampu menerima setiap perubahan dan terbuka terhadap masukan yang bernilai konstruktif. Ketiga adalah aktifitas kelembagaan yang mengedepankan nilai pelayanan publik. Ketiganya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Perspektif analisis dalam memantapkan kelembagaan ini kemudian bertumpu pada temuan ketiga aspek tersebut.

a. Eksistensi Kelembagaan

Eksistensi kelembagaan dilihat melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam rangka memenuhi harapan publik. Sebagai salah satu lembaga negara KPU mengemban amanah konstitusi sebagai lembaga

penyelenggara pemilu untuk menghadirkan pemilu yang jujur, demokratis, dan bebas dari kepentingan kelompok atau golongan manapun. Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa dalam kaitannya menampung setiap aspirasi dan keluhan masyarakat KPU menempatkan standar kriteria perekrutan untuk menjadi bagian dari KPU. Diantaranya adalah kepercayaan, keahlian, dan kejujuran. Hal ini ternyata berdampak langsung terhadap kinerja anggota KPU untuk mewujudkan cita-cita dari Pemilu sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

b. Kepribadian Kelembagaan

Kepribadian lembaga pemilu dapat dapat dinilai dari berbagai aspek yaitu karakter lembaga penyelenggara undang-undang yang bersifat normatik dan imparial. Oleh karena itu, setiap perubahan dinamika di dalam masyarakat maupun publik harus dapat terjawab melalui serangkaian kebijakan lembaga. Peneliti menemukan bahwa dari hasil laporan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 menganut sistem *stese/ aktif*, dimana masyarakat diminta aktif dalam melakukan pemantauan atau pengecekan untuk melihat seluruh anggota keluarga mempunyai syarat-syarat sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem ini yang dianut oleh KPUD Temanggung dalam memastikan bahwa hak warga Kabupaten Temanggung dapat tersalurkan di Pilkada.

c. Aktivitas Kelembagaan

Dalam aktivitasnya lembaga publik harus mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan segalanya. Hal ini merupakan cerminan kemampuan dan kekuatan lembaga dalam memenuhi harapan publik. KPUD Temanggung memegang prinsip keterbukaan dalam menjalankan aktivitasnya demi menciptakan keberlangsungan pemilu yang demokratis dan jujur, contohnya: keterbukaan terhadap informasi anggaran dan lain-lain disampaikan langsung di sosial media KPUD.

5.3. Menciptakan Kebersamaan

Konteks menciptakan kebersamaan dengan mengenal khalayak dan menyusun pesan persuasif, menetapkan metode isi pesan politik serta upaya memilih dan memilah media (Arifin, 2011: 243). Media menjadi alat untuk merekatkan komunitas (Sunarto et al., 2018). Langkah tersebut digunakan untuk menciptakan suasana keakraban, kebersamaan sehingga rakyat atau masyarakat memiliki empati untuk ikut serta dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013. Memahami khalayak dilakukan dengan pendekatan psikologi maupun demografi, adapun penyusunan pesan persuasif didasarkan pada segmentasi pemilih dan sifat lembaga yang bersifat kekinian.

Metode penyusunan pesan persuasif mengedepankan pada aspek informatif melalui upaya memberikan pemahaman perencanaan, tahapan maupun pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berdasarkan norma dan kaidah hukum yang berlaku. Pola pendekatan persuasif dilakukan melalui sosialisasi maksimal di semua lini dengan melibatkan tokoh masyarakat dan nilai kebudayaan. Upaya ketiga adalah dengan pendekatan edukatif melalui peran guru pendidikan pancasila maupun pada tingkat sarasehan pemilihan kepala daerah. Aspek keempat dalam memilih media bersifat fleksibel dan menyesuaikan target sasaran lembaga, menggunakan kombinasi media konvensional, media sosial maupun media massa.

5.4. Membangun Konsensus

Membangun konsensus merupakan langkah ke empat dalam strategi komunikasi politik yang dilakukan KPUD Kab. Temanggung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013. Menurut Anwar Arifin membangun kesepahaman antara lembaga politik dan masyarakat maupun dengan partai politik tidak dapat dipisahkan dalam mensukseskan tujuan strategi komunikasi politik (Arifin, 2011: 262). Konteks membangun konsensus yang dilakukan

lembaga politik terbagi menjadi dua hal pertama seni berkompromi dan kedua adalah kemampuan membuka diri.

Kompromi diwujudkan dengan pendekatan kekeluargaan, humanisme dan mencari jalan tengah bersama dengan melibatkan seluruh *stakeholder*, tokoh partai, tokoh ormas, saksi saksi penyelenggaraan pilkada maupun birokrasi. Langkah membuka diri dilakukan dengan mengedepankan dialog lintas tokoh partai maupun ormas dan mencegah adanya konflik melalui upaya duduk bersama seluruh stakeholder. Upaya ini diimplementasikan di dalam keseluruhan rencana strategis demi tercapainya tujuan politik kelembagaan KPUD Kab. Temanggung dalam mensukseskan Pilkada Jateng 2013.

6. Kesimpulan

Menurut Arifin, strategi komunikasi politik dikategorikan menjadi empat hal yaitu merawat ketokohan, memantapkan kelembagaan, menciptakan kebersamaan dan membangun konsensus. Keseluruhan perencanaan strategi yang dilakukan KPUD Kab. Temanggung untuk menyukseskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 ditopang oleh kohesivitas. Kohesivitas dalam konteks strategi komunikasi politik berpengaruh terhadap pemilu yang demokratis. Ketertarikan secara interpersonal antara individu satu dengan individu yang lain memunculkan rasa tanggung jawab di semua lini lembaga penyelenggara pemilu.

Pengaruh kohesi mampu mendorong penyelenggaraan pemilu yang didasarkan pada prinsip keterbukaan, efisien dan ketepatan. Keterbukaan dirasakan dalam strategi komunikasi politik kelembagaan dengan indikasi tingginya umpan balik dan arus informasi yang bersifat terbuka dan merata. Tingginya ikatan hubungan dan umpan balik dirasakan didalam ketokohan lembaga melalui sinergitas ketokohan yang kuat. Interaksi yang bisa teramati publik dan delegasi wewenang yang merata. Menciptakan respon yang kuat atas tantangan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Ikatan

kebersamaan yang kuat pada ketokohan lembaga dirasakan berdampak pada upaya memantapkan lembaga. Indikasi ini dapat dilihat dari eksistensi komisi pemilihan umum dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis dengan tingkat capaian partisipasi tinggi.

KPU memiliki kekhasan dalam delegasikan kewenangan dan peraturan perundangan terkait pemilihan umum. Kredibilitas ketokohan yang teramati oleh publik dengan segala interaksi yang dibangun di dalam internal lembaga secara kohesi mendorong upaya memantapkan lembaga, menciptakan kebersamaan dan membangun konsensus. Nilai ketertarikan, tanggung jawab bersama yang diikat dalam suatu hubungan yang kuat dalam kinerja penyelenggara pemilu menjadikan tahapan strategi komunikasi politik berfungsi secara optimal.

Kohesivitas di tingkat ketokohan lembaga tidak hanya dijadikan alasan kuat untuk melanggengkan kedudukan semata. Kohesivitas yang bernilai positif dibangun dalam cerminan lembaga yang mampu memenuhi harapan masyarakat. Secara masif eksistensi, kepribadian, dan aktifitas lembaga sebagai akibat dari intitusi yang kuat. Sumberdaya yang mampu menterjemahkan semua aturan dengan baik, tidak meninggalkan unsur kebudayaan dan nilai ideologi masyarakat Kab. Temanggung. Kombinasi ini sebagai jalan bagi KPU untuk menciptakan kebersamaan dengan seluruh tahapan strategi komunikasi politik kelembagaan. Memahami khalayak, penyusunan pesan persuasif, metode penyampaian pesan maupun pemilihan media yang tepat. Langkah untuk mencapai tujuan politik dapat mencapai satu kesepahaman bersama jika kompromi dan membuka diri secara sadar dilakukan oleh seluruh jajaran KPU pada Pilkada Jateng 2013.

Daftar Pustaka

- AgnieskaTurska-Kawa, Waldemar Wojtasik (2013). *Communication Function of Elections*. Journal "Communication Today" Vol.1/2013 ISSN 1338-130X.
- Arifin, Anwar (2011). *Komunikasi Politik, Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*: Yogyakarta. Graha Ilmu.

- Bungin, Burhan (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu Sosial lainnya: Jakarta. Kencana.
- Dharma Tintri Ediraras, Dewi A. Rahayu, Ary Natalina, Winda Widya (2013). *Political Marketing Strategy of Jakarta Election in The 2012s*. Journal "ScieVerse ScienceDirect" Prosedia and Behavioral Sciences 81, 584-588.
- Denzin, Norman K dan Yvonna S Lincoln.(2009). *Handbook Of Qualitative Reasearch Sebuah Terjemahan*: Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Heryanto, Gun G dan Shulham Rumuru (2013). Komunikasi Politik Sebuah Pengantar. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Kriyantono, Rachmat (2010). Teknis Praktis Riset Komunikasi: Jakarta. Kencana.
- Moesafa, Joko J (2008). *Analisi Strategi Keberhasilan Anggota Legislatif Meraih Kursi dengan BPP Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai*: Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Pedoman Teknis Sosialisasi Penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 Nomor: 06/kpts/KPU-Prov-012/2012.
- Rakhmat, Jalaludin (2005). *Psikologi Komunikasi*: Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Sunarto, Nugroho, A., Purbaningrum, D., Lestari, A. P., Indrayani, H., & Tunggal, I. D. A. (2018). Local Media and Local Community in Semarang. *Proceedings of the 3rd International Conference on Indonesian Social & Political Enquiries (ICISPE 2018)*, 366(Icispes 2018), 57–59. Retrieved from <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icispes-18/125922568>
- West R, Turner, dan Lynn H (2007). *Introducing Communication Theory*: New York. McGrawHill.

INTERNET

- _____(2013, 4 Juni). *Warga Jateng Tak Nyoblos di Pilgub 2013* dalam (<http://regional.kompas.com/read/2013/06/04/15381174/12.Juta.Warga.Jateng.Tak.Nyoblos.di.Pilgub.2013>) diunduh pada 20 Oktober 2013 pukul 16.05 WIB.
- (2014, ____ 28 Mei). *Partisipasi, Meningkat* dalam (<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/28/260028/Partisipasi-Meningkat-73>.) diunduh pada 10 November 2014 pukul 10:07 WIB.